

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara (NTB) adalah salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang berada di pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suku Sasak, sementara di bagian timur terdapat suku Bima dan Sumbawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di pulau Sumbawa. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salahsatu daerah tujuan wisata setelah Provinsi Bali, dimana Nusa Tenggara Barat sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta Sumber Daya Alam yang kaya dan juga lapangan investasi yang cukup banyak. Akan tetapi masih perlu adanya strategi maupun upaya pemerintah memanfaatkan potensi wilayah untuk di kembangkan dengan menarik investasi maupun melakukan kerjasama. Kemajuan teknologi informasi komunikasi telah mendorong globalisasi yang dimana terjadinya saling ketergantungan antar negara danantar masalah yang semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia (www.ntbprov.go.id).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya Hak kewenangan

pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut, maka kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerjasama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara.

Berdasarkan undang undang yang telah ditetapkan, NTB melakukan kerjasama dengan beberapa provinsi. Salah satunya kerjasama antara NTB dan Zheijiang dalam beberapa bidang kerjasama.

B. Rumusan masalah

Mengapapardiplomasi sister province antara provinsi NTB dengan provinsi Zheijiang (RRT) dapat terjalin?

C. Kerangka Teoritik

TEORI PARADIPLOMASI

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan

kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state', atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah 'paradiplomacy' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah 'parallel diplomacy' menjadi 'paradiplomacy', yang mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah 'micro-diplomacy' (Apriliani dkk, 2019).

Studi praktik Paradiplomacy ini telah melengkapi pendapat Stefan Wolf bahwa Paradiplomacy ini mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh entitas 'Sub-state', atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Kemudian dari hal tersebut, maka pihak Pemda luar negeri yang membuka peluang kerjasama dan juga memiliki persamaan baik dalam bidang pertanian, kelautan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di negara Indonesia untuk bisa saling merangkul dan memajukan negara dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing di arena internasional atau hubungan luar negeri (Mukti, 2013).

Kecendrungan pemerintah daerah menunjukkan peran dalam mengelola daerah otonomnya maupun aktifitas dalam hubungan internasional menunjukkan peran paradiplomasi semakin marak dalam era globalisasi saat ini. Menurut Ivo

Duchacek dan Panayotis Soldatos dalam teori paradiplomasi Duchacek juga menjelaskan paradiplomasi memiliki tiga tipe yaitu, pertama adalah *transborder paradiplomacy* pada tipe ini menunjuk pada hubungan institusional, formal ataupun informal oleh pemerintah pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun secara geografis wilayah-wilayah sub nasional tersebut berbatasan langsung. Kedua adalah *transregional paradiplomacy*, hubungan diplomasi yang dilakukan antara dua atau lebih pemerintah sub nasional yang wilayahnya tidak berbatasan secara langsung namun negara dimana unit-unit sub nasional tersebut berada berbatasan secara langsung. Sedangkan Ketiga adalah *global paradiplomacy* yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintah sub nasional di dua atau lebih negara yang tidak berbatasan (Mukti,2013).

Selanjutnya secara fungsional paradiplomasi juga dibedakan menjadi dua tipe, Soldatos menjelaskan, tipe pertama adalah *global paradiplomacy* tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi. Tipe kedua adalah *regional paradiplomacy* tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Pada umumnya menyangkut isu-isu politik tingkat rendah. Pada regional paradiplomacy ini terdapat dua klasifikasi yaitu ketika isu-isu yang terjadi menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung disebut dengan *macroregional paradiplomacy* (Mukti,2013).

Paradiplomasi merupakan alat penting dalam perkembangan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak asing untuk mempererat hubungan kerjasama. Hubungan antar pemerintah daerah dengan pihak asing saling memberi keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah daerah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional.

Proyek paradiplomasi Pemerintah Nusa Tenggara Barat adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah kondisi melalui gedung hubungan dengan lembaga asing dan pemerintah melakukannya dengan menjangkau beberapa provinsi diluar negeri, seperti Zhejiang provinsi Republik Rakyat Cina, dan negara lain. Praktik paradiplomasi terutama dalam bentuk sister city of sister provinsi dan penanaman modal asing perjanjian, seperti yang dinyatakan oleh Sibawaihi (2016) dan Utami (2017). Itu opsi adalah yang paling sesuai untuk wilayah dan bisa dibilang yang paling sederhana meskipun prosesnya tidak seperti itu sesederhana kelihatannya. kekuatan dari kota dan provinsi harus branding menjadi akun penting seperti tanpa objek yang tepat untuk dipromosikan kepada komunitas internasional (Subarkah, 2018), upaya untuk menarik kolaborator dan investor akan lebih sulit.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik jawaban sementara bahwa pemerintah NTB menjalin paradiplomasi dengan pemerintah Zheijiang Karena:

- NTB menganggap bahwa Zheijiang merupakan pilihan yang paling tepat setelah melewati kalkulasi untung rugi baik dari segi anggaran yang dikeluarkan yaitu cukup efisien dibandingkan dengan beberapa tawaran kerjasama yang ditawarkan kepada NTB
- Kerjasama yang nyata antara provinsi NTB dengan Provinsi Zheijiang berdasarkan kesamaan potensi yang diinginkan dalam bidang pariwisata, Pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan industry kreatif.
- Terbukanya hubungan Internasional NTB dan terjadinya tukar menukar informasi , ide, pengetahuan dan budaya.

E. Metode Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat Deskriptif dimana penulis mencoba menjelaskan perkembangan kerjasama atau paradiplomasi province antara provinsi NTB dengan provinsi Zheijiang. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang ditunjang dengan sumber berupa literatur, gambar, skema, dan lain-lain. Sedangkan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dengan satu atau lebih variabel dengan tidak membuat perbandingan(*comparison*) atau hubungan(*connection*) dengannilai lainnya (Sugiono, dalam jurnal “Metode Penelitian Bisnis”, 2008).

Metode deskriptif kualitatif adalah bagian dari penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan fenomena

dan karakteristiknya dan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi terperinci, membuat perbandingan atau evaluasi serta mengungkapkan fakta, fenomena, variabel, dan keadaan terjadi ketika penelitian dilakukan. Metode penelitian ini berfokus pada bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif menggunakan observasi dan survey dengan melibatkan eksplorasi induktif dalam analisis data untuk mengidentifikasi konsep, tema atau pola yang berulang dan kemudian menggambarkan dan menafsirkan kategori tersebut (Sugiono, dalam jurnal “Metode Penelitian Bisnis”, 2008).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang bersifat sekunder yang didapatkan melalui kajian pustaka, jurnal, e-book dan internet.

F. Lingkup Waktu

Dalam karya tulis ini, untuk memfokuskan pembahasan penuliskemudian akan mengambil lingkup waktu dari tahun 2014-2018. Lingkup waktu ini dipilih menyesuaikan dengan perkembangan kerjasama sister Province antara NTB dan Zheijiang.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bagian yang saling berhubungan, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Kerangka Teoritik
- D. Hipotesis
- E. Metode Penelitian
- F. Lingkup waktu
- G. Sistematika Skripsi

BAB II: PARADIPLOMASI SISTER PROVINCE PEMPROV NTB

- A. Dinamika Pemerintah Provinsi NTB
 - 1. Pemerintah Provinsi NTB
 - 2. Letak Geografis Provinsi NTB
- B. Dinamika Pemerintah Provinsi Zheijiang
- C. Sister Province
- D. Fokus Bidang Kerjasama antar Province
- E. Hambatan yang dihadapi dalam perwujudan pembentukan
Paradiplomasisister province NTB dengan Zheijiang

BAB III:KEPUTUSAN PEMERINTAH PROVINSI MEMBANGUN PARADIPLOMASI / KERJASAMA PROVINCE

- A. Otonomi Daerah
- B. Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang
- C. Peraturan Daerah
- D. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB IV :ALASAN NTB MENJALIN PARADIPLOMASI / KERJASAMA PROVINCE DENGAN ZHEIJIANG

A. Paradiplomasi Sister Province NTB Dengan Zheijiang 2014-2018

B. Keuntungan NTB melakukan paradiplomasi dengan Zheijiang

BAB V : KESIMPULAN